

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemiskinan merupakan salah satu masalah klasik yang dialami oleh masyarakat global di berbagai negara, tak terkecuali di negara Indonesia. Bahkan sampai saat ini, belum ditemukan rumusan atau solusi penanganan kemiskinan yang jitu dan sempurna untuk mengatasi masalah kemiskinan, sehingga harus terus - menerus ada rumusan dan terobosan yang perlu dikembangkan. Menurut Maimoen (2022), Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan bahwa hingga maret 2022 terdapat 25 provinsi yang mengalami penurunan secara signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Salah satu provinsi yang mengalami penurunan kemiskinan secara signifikan adalah provinsi Jawa Tengah. Menurut CNBC (2023) tingkat kemiskinan di Jawa Tengah terbilang jauh di atas rata-rata nasional yaitu 9,57% per September 2022. Selain itu, kemiskinan di Jawa Tengah juga jauh di atas rata-rata provinsi di Pulau Jawa yakni 8,67%.

Angka kemiskinan sempat melonjak tajam pada 2020 akibat pandemi Covid-19. Pada September 2020, angka kemiskinan di Jawa Tengah tercatat 11,84% sementara jumlah penduduk miskin tercatat 3,98 juta. Menurut Kusnandar (2022), jumlah penduduk miskin di Jawa Tengah mencapai 3,83 juta jiwa (10,93%) dari total jumlah penduduk pada bulan Maret 2022. Angka kemiskinan di Jawa Tengah pada bulan Maret 2022 turun 32 basis points (bps) dibandingkan bulan September 2021, dan mengalami penyusutan sebesar 86 bps dibandingkan bulan Maret 2021. Menurut Kusnandar (2022), meskipun terjadi penurunan, angka kemiskinan di Jawa Tengah ini masih terbilang lebih tinggi dibanding sebelum terjadi pandemi Covid-19.

Gambar 1.1 di bawah ini menunjukkan jumlah presentase penduduk miskin yang ada di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2010 – 2021. Data tersebut menunjukkan bahwa presentase penduduk miskin di Provinsi Jawa Tengah mengalami fluktuasi seiring berjalannya waktu. Hal ini terlihat bahwa penduduk miskin meningkat sebesar 0.38% pada periode tahun 2021. Peningkatan pada tahun 2021 ini dapat terjadi karena pada tahun tersebut sedang terjadi pandemi Covid-19.



Sumber : BPS, 2021 (diolah)

Gambar 1.1
Presentase Penduduk Miskin di Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2010 – 2021 (Persen)

Disisi lain, kualitas sumber daya manusia yang buruk juga merupakan salah satu faktor penyebab terjadinya kenaikan kemiskinan di suatu daerah atau wilayah. Kualitas sumber daya manusia ini dapat dilihat dan dianalisis melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Dimana, apabila kualitas ataupun produktivitas seseorang rendah, mengakibatkan juga rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Gambar 1.2 di bawah ini menunjukkan adanya peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di setiap tahunnya yaitu dari tahun 2010-2021. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas sumber daya manusia di Provinsi Jawa Tengah terus mengalami peningkatan. Hal ini juga pastinya tidak akan terlepas dari beberapa komponen dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM) seperti usia harapan hidup saat lahir, harapan lama sekolah, rata – rata lama sekolah, dan pengeluaran per kapita dari setiap orang. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa pembangunan manusia menjadi masalah serius yang perlu digagas dan dipantau

peningkatannya karena modal manusia menjadi faktor penentu tingkat kesejahteraan hidup dan percepatan pembangunan di suatu daerah.



Sumber : BPS, 2021 (diolah)

Gambar 1.2

**Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2010 – 2021 (Persen)**

Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) ini dapat disokong dengan adanya keberadaan fasilitas di bidang pendidikan. Rendahnya mutu pendidikan di suatu daerah akan menciptakan generasi muda yang memiliki kualitas kerja rendah pula. Hal ini, tentunya akan membuat seseorang tersebut kesulitan dalam mencari pekerjaan. Rata – rata lama sekolah mengindikasikan tinggi rendahnya pendidikan yang dicapai di dalam suatu masyarakat. Semakin tinggi tingkat pendidikan di dalam suatu masyarakat menandakan bahwa semakin tinggi pula kualitas pola pikir serta pola tindakan seseorang tersebut. Menurut Tobing (2019), seseorang yang memiliki tingkat pendidikan lebih tinggi diukur berdasarkan lamanya waktu seseorang tersebut untuk sekolah dan nantinya seseorang tersebut akan mendapatkan upah yang lebih baik dibandingkan dengan seseorang yang memiliki waktu yang lebih singkat untuk sekolah.

Menurut Thooyibah (2021) pendidikan dapat berguna untuk menambah pengetahuan seseorang di dalam dunia kerja. Hal ini dapat dijadikan investasi

pembangunan yang hasilnya dapat dinikmati di kemudian hari. Menurut Klasen (2019), kepemilikan asset dasar yaitu modal manusia yakni pendidikan bagi penduduk miskin berpengaruh terhadap pengurangan kemiskinan. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa dengan tingginya pendidikan yang dimiliki seseorang, akan meningkatkan kualitas kerja seseorang tersebut. Disisi lain, pada saat orang tersebut terjun ke dalam dunia pekerjaan, pendapat yang didapatkan pastinya akan sesuai juga dengan kualitas kerja seseorang tersebut berdasarkan latar belakang pendidikannya.

Pengangguran merupakan faktor lain penyebab terjadinya kemiskinan. Dalam penelitian ini, variabel pengangguran yang digunakan adalah pengangguran terbuka. Menurut Geografi (2018), pengangguran terbuka merupakan kondisi seseorang sama sekali tidak bekerja atau sedang berusaha mencari pekerjaan. Pengangguran ini dapat terjadi karena sempitnya lapangan pekerjaan dan ketidakcocokan antara kesempatan kerja dengan latar belakang pendidikan seseorang tersebut. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan salah satu faktor utama yang digunakan untuk mengukur tenaga kerja yang tidak diserap oleh pasar tenaga kerja. Jumlah pengangguran yang ada di suatu wilayah berhubungan erat dengan tingkat kemiskinan yang ada di suatu wilayah tersebut. Hal ini dapat terjadi karena penduduk di Indonesia khususnya Provinsi Jawa Tengah memiliki ketergantungan yang besar terhadap pendapatan gaji atau upah yang diperoleh. Artinya, apabila seseorang kehilangan pekerjaan, akan mengakibatkan semakin tingginya pengangguran dan pastinya akan meningkatkan kemiskinan.



Sumber : BPS, 2021 (diolah)

Gambar 1.3
Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2010 - 2021 (Persen)

Menurut Aziz (2023), pada tahun 2020 saat pandemi covid-19 melanda jumlah TPT di Provinsi Jawa Tengah sebesar 6,48 persen, pada 2021 sebesar 5,96 persen, dan 2022 sebesar 5,57 persen. Hal ini memberikan kesimpulan bahwa dari tahun 2020 hingga tahun 2022 Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Jawa Tengah mengalami penurunan yang mengindikasikan adanya semakin kecilnya pengangguran. Selain itu, penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka ini juga dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti adanya banyak perusahaan yang pada saat pandemi Covid-19 sempat merumahkan karyawannya, setelah berhasil melalui pandemi tersebut, tak sedikit perusahaan yang merekrut kembali karyawannya, adanya pengembangan dan relokasi perusahaan dari luar provinsi, infrastruktur, daya saing upah juga ketersediaan tenaga kerja, serta mudahnya perizinan berusaha.

Sejatinya, pengangguran tentu mengganggu kemajuan sosial terutama pertumbuhan ekonomi di suatu daerah atau wilayah. Pertumbuhan ekonomi di suatu daerah merupakan suatu usaha yang ditujukan untuk

meningkatkan taraf hidup masyarakatnya serta memperluas lapangan pekerjaan dan menghasilkan pemerataan pembagian pendapatan di dalam masyarakat. Menurut Wiriana (2022), dilihat dari pertumbuhan ekonomi triwulanan, terjadi perlambatan pertumbuhan ekonomi Jateng pada triwulan III 2022 dibanding triwulan sebelumnya, yang berdampak terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah ini. Dalam penelitian ini, pertumbuhan ekonomi diproyeksikan ke dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Menurut Garnella *et al.* (2020) PDRB merupakan nilai tambah dari barang dan jasa yang dihasilkan dalam satu periode tahun.

Berdasarkan dengan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa peningkatan indeks pembangunan manusia dapat dilakukan dengan meningkatkan kualitas sumber daya melalui fasilitas pendidikan. tingginya kualitas sumber daya manusia melalui pendidikannya membuat semakin produktifnya seseorang untuk melakukan pengembangan diri dengan hasil akhir terjadi peningkatan juga dari segi penghasilannya. dengan demikian, tingkat pengangguran akan dapat diminimalisir dan pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah khususnya di provinsi jawa tengah akan tercipta. Maka dari itu, peneliti Oleh karena itu peneliti ingin mengetahui dan menganalisis seberapa besar pengaruh indeks pembangunan manusia, pertumbuhan ekonomi, tingkat pendidikan dan tingkat pengangguran terbuka terhadap kemiskinan di provinsi jawa tengah tahun 2010 – 2021.

1.1 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan dalam bagian latar belakang, maka rumusan masalah yang telah disusun dalam penelitian ini adalah:

- 1) Bagaimana pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 – 2021?
- 2) Bagaimana pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 – 2021?
- 3) Bagaimana pengaruh Tingkat Pendidikan terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 – 2021?

- 4) Bagaimana pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 – 2021?

1.2 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh indeks pembangunan manusia (IPM) terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 – 2021
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 – 2021
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh tingkat pendidikan terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 – 2021
4. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh tingkat pengangguran terbuka terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 – 2021

1.3 Manfaat Penelitian

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan di atas, maka manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Bagi penulis, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar derajat sarjana (S1) pada Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
2. Bagi pembaca, dapat dijadikan sebagai acuan atau referensi dalam melakukan penelitian selanjutnya terkait dengan kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah ataupun di daerah lain.
3. Bagi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, dapat digunakan sebagai salah satu acuan dalam menetapkan solusi dan kebijakan yang lebih relevan untuk mengurangi tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah.
4. Bagi masyarakat umum dan pembaca, diharapkan dapat menambah wawasan mengenai masalah kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah.

1.4 Hipotesis

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian yang telah dipaparkan di atas, maka dapat disusun suatu hipotesis sebagai berikut :

- 1) Diduga Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah tahun 2010 – 2021
- 2) Diduga Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah tahun 2010 – 2021
- 3) Diduga Tingkat Pendidikan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah tahun 2010 – 2021
- 4) Diduga Tingkat Pengangguran Terbuka berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah tahun 2010 – 2021

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini terdiri dari lima bagian yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, hipotesis, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tentang teori-teori yang berkaitan dengan kemiskinan, dan penelitian terdahulu.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang obyek penelitian, jenis data dan sumber data, definisi operasional variabel, metode dan analisis data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang deskripsi daerah penelitian, analisis data, hasil analisis data dan pembahasannya.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian, dan saran.